

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Pada saat ini perkembangan perpajakan di Indonesia semakin maju dan semakin menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pajak merupakan salah satu pendapatan suatu negara yang diperoleh dari pungutan harta atau kekayaan penduduk negara tersebut untuk kebutuhan penyelenggaraan negara. Suatu negara apabila menerapkan sistem pajak yang benar, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pungutan pajak tersebut. Hasil dari perpajakan tersebut digunakan sewajibnya untuk kepentingan publik seperti pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan sumber daya alam (SDA) serta pembangunan penunjang infrastruktur. Masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di negara tersebut, diwajibkan membayar pungutan (pajak) sesuai yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Pungutan yang dilakukan oleh suatu negara sudah diatur dalam perundang-undangan sehingga tidak merugikan atau memberatkan penanggung pajak dalam melakukan iuran yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara negara. Apabila wajib pajak orang pribadi atau badan tidak melaporkan atau membayar pajak akan dikenakan sanksi yang sudah diatur dalam Undang-undang perpajakan. Di Indonesia lembaga yang menangani keterkaitan dengan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak atau sering disebut (DJP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai unit kerja yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan yaitu kantor pelayanan pajak atau sering disebut (KPP). Kantor pelayanan pajak (KPP) terbagi menjadi 4 (empat) jenis sub bagian yaitu, KPP Besar, KPP Medium, KPP Pratama dan KPP Khusus. Dengan adanya pembagian unit

kerja tersebut, DJP berhasil membangun sistem yang baik sehingga mampu menjalankan organisasi pelayanan pajak di Indonesia.

Berdasarkan ketetapan pemerintah menurut undang-undang KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (2) pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Masyarakat tidak bisa merasakan imbalan secara langsung artinya, disaat wajib pajak orang pribadi atau badan membayarkan pajaknya, wajib pajak tidak secara langsung merasakan imbalan, karena pemerintah perlu mengelola hasil dari pungutan pajak terlebih dahulu untuk budgeting ditahun berjalan atau tahun berikutnya. Masyarakat harus taat kepada peraturan tersebut, sehingga negara dapat menyelenggarakan negara dengan baik sedangkan pemerintah bertanggung jawab penuh atas pungutan pajak untuk keperluan Negara dan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat.

CV X merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2018. Kendala yang di dapat oleh perusahaan ini adalah sering terjadi kelalaian dalam pelaporan pajak yang mengakibatkan perusahaan lalai dalam melaporkan pajaknya dan mendapat sanksi dari Direktorat Jendral Pajak. Hal ini disebabkan karena tidak adanya prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan pelaporan maupun pemungutan pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang disampaikan diatas dan sebagaimana untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar Ahli Madya Universitas Islam Indonesia, oleh sebab itu, maka penulis mengambil judul **“STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV X”**

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan magang ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui apakah CV X sudah memiliki SOP terkait PPh pasal 4 ayat (2)
- b. Mengetahui praktik terkait dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada CV X

1.3 Target Magang

Berdasarkan tujuan di atas, maka target magang yang akan dicapai adalah mampu membuat rekomendasi standar operasional prosedur pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) usaha jasa konstruksi pada CV X.

1.4 Bidang Magang

Pelaksanaan magang dilakukan di Kantor Jasa Akuntansi Sri Suryaningsum.

1.5 Lokasi Magang

Nama Perusahaan : Kantor Jasa Akuntansi Sri Suryaningsum

Alamat : Perum UPN Sempu A-10 Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Kode Pos : 55584

Nomor Telp : 0274 283 4162

Email : kja.srisuryaningsum@gmail.com

Gambar 1.1 : Denah KJA Sri Suryaningsum

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini menyangkut 4 pokok bagian pembahasan yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian bab ini berisi tentang alur penulisan tugas akhir yang dirancang berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan magang, tujuan magang, target magang, serta lokasi magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan langsung dengan dasar pemikiran penulis serta permasalahan yang dihadapi sebagai landasan penulisan laporan tugas akhir.

BAB III PEMBAHASAN DESKRIPTIF

Bagian bab ini berisi pembahasan data yang diperoleh pada saat kegiatan pelaksanaan magang serta menceritakan gambaran umum Kantor Jasa Akuntansi Sri Suryaningsum dan pembahasan projek yang di dapat oleh perusahaan.

BAB IV KESIMPULAN

Bagian bab ini berisikan hasil dari penulisan tugas akhir yang berupa kesimpulan dari penulis.